



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD TIO ALIANSYAH
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 664774

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 307 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.035.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **743.000.000**

1. MOTOR, ROYAL ENF BULLET CLASIC 500 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **286.850.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.459.212
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.037.309.212
III. HUTANG	Rp.	297.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.740.309.212

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.